

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Keuangan Daerah. 2014. *Modul 2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan*. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri
- Faradillah, A. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah* (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi ke 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Niu, F.A.L., Karamony, Herman, Tangkuman, Steven. (2014). *Analisis Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mobagu*. Jurnal EMBA Vol. 2 No. 4. Hal. 714-722. Universitas Sam Ratulangi Manado: Manado.
- Ramadhan, R. Sandy., Rustam,A. Rusaktiva. 2013. Jurnal. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulung Agung*. Universitas Brawijaya: Malang
- Sari, Astri. W. 2012. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No. 71 Tahun 2010 Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sidoarjo*. STIE Perbanas: Surabaya.
- Sudaryati, Erina & Mohamed, Nafsiah. 2017. *Enhancing Governance in Indonesian Local Government Through Accrual Accounting: Are We Ready?*. Advanced Science Letters. 23. 7723-7727. 10.1166/asl.2017.9562.
- Republik Indonesia 2014. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentangn Pemerintah Daerah

Republik Indonesia 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia 2003. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Republik Indonesia 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Republik Indonesia 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Republik Indonesia 2019. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia 2009. Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Republik Indonesia 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah

Republik Indonesia 2017. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Republik Indonesia 2017. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur